

## MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN

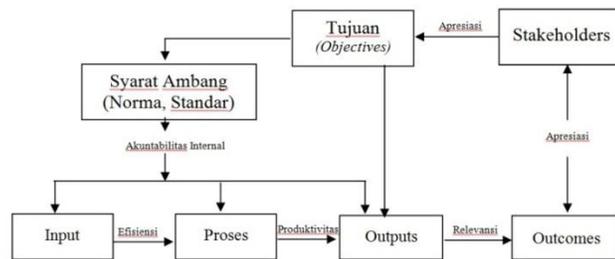
**Mamur Sutisna. WD**  
**Dosen FKIP Universitas Subang**

### ABSTRAK

Dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam rangka memenuhi standar minimal sarana pendidikan seperti adanya ruang kelas yang memadai, namun bantuan biaya rehabilitasi yang diberikan pemerintah selalu tidak mencukupi sehingga untuk bisa membangunnnya tersebut masih diperlukan sejumlah dana dari masyarakat. Khususnya di Kabupaten Subang. Rehabilitasi ruang belajar Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta tiap tahun meningkat berkat peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah serta pihak yayasan dan juga masyarakat. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui upaya pemberdayaan agar partisipasi berupa tenaga dan pikiran bisa diperoleh untuk mendukung pembangunan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang rusak. Tumbuhnya partisipasi tersebut adalah berkat upaya pemberdayaan : Kepala Sekolah, Komite Sekolah, pengurus Yayasan dan Guru-guru. Penelitian didasarkan atas teori Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang telah menghasilkan tumbuhnya partisipasi masyarakat yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan rehabilitasi ruang kelas yang rusak. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang difokuskan pada Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Ketua Yayasan dengan lokasi penelitian di 2 SD yang berada di Kabupaten Subang. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Upaya pemberdayaan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Ketua Yayasan melalui pembinaan berupa seminar, lokakarya dan *work shope* yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. (2) Upaya pemberdayaan yang diikuti dengan kebijakan sekolah telah menumbuhkan kemandirian sekolah dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan melakukan evaluasi jalannya pembangunan rehabilitasi ruang kelas yang diharapkan. (3) Kebijakan Pemberdayaan sekolah dan pelimpahan wewenang Kepada Sekolah telah mendorong tumbuhnya rasa memiliki dari pihak masyarakat yang menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap sekolah. (4) Kebijakan pembangunan sarana fisik sekolah dengan model swakelola dengan prinsip *role sharing* telah membuktikan masih adanya semangat gotong royong antara pihak Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Kesimpulan Penelitian ini adalah, (1) Upaya mendukung pembangunan sarana sekolah perlu melibatkan sumberdaya manusia baik dari pihak birokrasi Pemerintahan maupun pihak stakeholder, (2) Upaya pemberdayaan yang dilakukan telah menumbuhkan kemandirian sekolah.

## A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan berhubungan langsung dengan *instrumental inputs*, *raw inputs*, dan *environmental inputs* yang secara keseluruhan mempengaruhi mutu proses-proses pendidikan dan pembelajaran, dan pada gilirannya mempengaruhi mutu keluaran (*outputs*) berupa mutu pendidikan dan mutu pelayanan. Secara keseluruhan interelasi antarkomponen tersebut membentuk suatu sistem pendidikan. Dalam kaitan ini Makmun (2000: 17) menggambarkan keterkaitan antar faktor yang saling berinterelasi dan saling mempengaruhi dalam analisis sistem pendidikan, termasuk peranan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan.



**Gambar. 1.1 Analisis Sistem Pendidikan**  
(Modifikasi dari Makmun, 2000: 17)

Perubahan yang terjadi bukan sekedar produk, aktifitas dan struktur eksternal yang dapat kita amati sehari-hari, tetapi juga perubahan internal yang terjadi dalam organisasi (Marquardt, 1996: 15). Perubahan-perubahan itu adalah mengenai nilai-nilai, cara berpikir, *mind-set*, strategi, dan bahkan mungkin tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian organisasi harus terus menerus melakukan analisa internal maupun eksternal agar dengan mudah dapat melakukan tindakan preventif maupun kuratif terhadap organisasinya.

Untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam memajukan pembangunan pada era globalisasi sekarang ini sudah banyak diterapkan strategi *participatory research appraisal* (PRA). Strategi ini pada prinsipnya memiliki banyak persamaan dengan teknik-teknik pembangunan masyarakat yang pernah ada, antarlain, *Participatory Research and Development* (PRD), *Participatory Rapid Appraisal* (PRA), *Participatory Learning Methods* (PLM), dan *Participatory Learning and Action* (PLA).

Menurut Korten (Adimihardja dan Hikmat, 2003: 1-3), pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centered development* / PCD).

Strategi PCD ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan nonmaterial melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Senada dengan pendapat Korten tersebut, ESCAP dalam *HRD Course for Property Alleviation* (1999) menyatakan bahwa permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, bukan

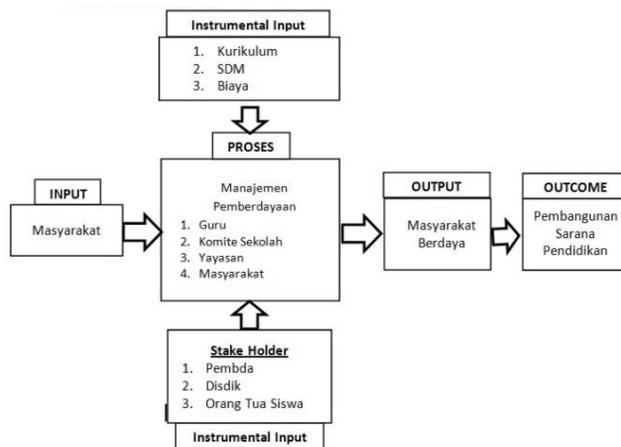
hanya akibat dan adanya penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian, namun juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam pengembangan pendidikan khususnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat, pemerintah daerah (Pemda) dalam beberapa tahun terakhir ini telah berupaya memberdayakan masyarakat, yakni melalui peranan partisipatif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar khususnya pada satuan sekolah dasar dan madrasah ibtdaiyah (SD/MI). Sejak tahun 2004 Pemda Subang telah mencapai kemajuan yang berarti dalam menerapkan strategi pembangunan yang berpusat pada rakyat khususnya dalam pembangunan pada sektor pendidikan. Sebagaimana telah diketahui, sejak tahun 2004 diterapkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan, *role sharing* khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Total anggaran untuk pembangunan pendidikan, 50 persen ditanggung pemerintah pusat. Departemen Pendidikan Nasional, 30 persen dari Pemerintah Propinsi, dan 20 persen dari anggaran Pemda. Dalam konteks inilah Pemda Subang melibatkan masyarakat setempat.

## B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

### 1. Perumusan Masalah

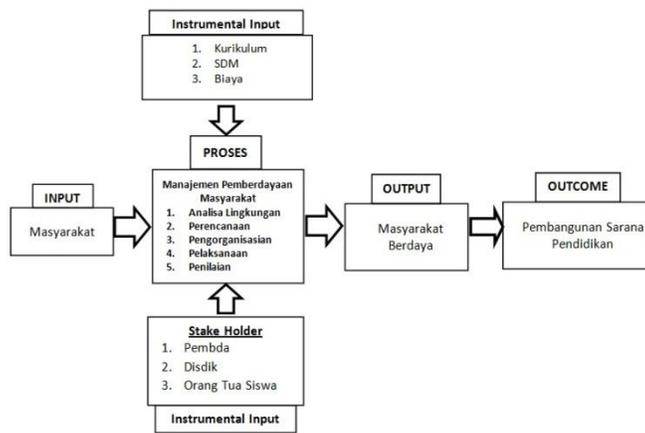
Dari latar belakang masalah di atas permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar nasional sehingga berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak atau percaya kepada masyarakat maupun Komite Sekolah, anggaran masih kurang, pihak dunia usaha yang kurang terpenggil untuk ikut bertanggung jawab terhadap sarana pendidikan karena terlalu kecil sehingga anggaran pemerintah kurang sebanding dengan kerusakan ruang belajar SD sehingga menjadi problema klasik. Proses pembangunan sarana dan prasarana bisa dengan pemberdayaan masyarakat dunia usaha, kepala sekolah, Komite Sekolah, dinas Pendidikan dan masyarakat orang tua siswa dengan komite seperti dalam gambar berikut



Gambar 1.2 Perumusan Masalah

## 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan manajemen Pemberdayaan Masyarakat yang penulis gambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1.3 Pembatasan Masalah**

## C. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan bagian fungsi integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Pemenuhan sarana dan prasarana agar tepat guna dan berdaya guna (efektif dan efisien) untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat yang tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang matang agar tepat, efektif dan efisien dalam pemanfaatannya.

Secara Etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung yang dapat mendukung mencapai tujuan dari penyelenggaraan pendidikan, misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dana dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dan lainnya.

Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut keputusan menteri P dan K No 079/1975.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Temuan studi ini secara garis besar terdiri atas 6 bagian, yaitu analisa lingkungan internal dan eksternal ; perencanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembagunan sarana dan prasarana pendidikan ; pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam pembagunan sarana dan prasarana pendidikan; pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembagunan sarana dan prasarana pendidikan; pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembagunan sarana dan prasarana pendidikan; dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat pada pembagunan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam pelaksanaan proram pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki komitmen dengan ditunjang ketahanan iman dan takwa (imtak), dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dan Komite Sekolah.

### C. PEMBAHASAN

Dari hasil temuan dan interprestasi, dalam pembahasan ini akan membagi data-data untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Studi lapangan ini dalam penelitian dilaksanakan di Kabupaten Subang, dengan subjek penelitian 2 SD yang terdiri dari satu negeri dan satu lagi berstatus swasta. Sesuai rancangan dalam penelitian ini terdapat 4 aspek yang dikaji seperti yang dijelaskan di atas yang bermuara pada penerapan manajemen pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi pembangunan sekolah di SD.

- a. Perencanaan.
- b. Pengorganisasian (organizing).
- c. Pelaksanaan.
- d. Pengendalian/pengawasan.

### D. KESIMPULAN

#### a. Simpulan Umum

Dari deskripsi Lapangan dan iteprestasi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang baik akan menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang efektif dan efesian juga *akuntible*.

#### b. Simpulan Khusus

- a. Kekuatan internal dan dukungan eksternal juga kelemahan, ancaman dari luar oleh kedua SD yang diteliti dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
- b. Bahwa proses perencanaan dengan melibatkan masyarakat / Komite Sekolah, proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar berjalan efektif, efesien, transparan dan *akuntible*.
- c. Berdasarkan dekripsi lapangan dan interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh personal sekolah dan Komite Sekolah termotivasi, satu tujuan yang sama, tersetruktur, memahami terhadap target yang ingin dicapai, dan jelas terhadap pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan, serta memiliki tanggung jawab bersama. Meskipun masih ada beberapa personal sekolah dan anggota komite yang belum optimal dalam kinerjanya.
- d. Berdasarkan dekripsi lapangan dan interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD berhasil secara optimal sesuai dengan rencana, meskipun masih ada SD yang tujuan dan sasarnya belum berhasil secara optimal.
- e. Dengan Strategi yang diterapkan oleh kedua SD dalam pengendalian dapat disimpulkan bahwa Strategi pengendalian melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi, pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD tercapai secara optimal. Meskipun masih ada dalam pelaksanaan yang belum optimal.

f. Berdasarkan deskripsi lapangan, interpretasi, dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada pembangunan sarana dan prasarna pendidikan SD adalah.

- 1) Kepala sekolah pendukung utama dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program.
- 2) Bentuk kerjasama yang baik dengan komite sekolah.

Faktor penghambatnya, yaitu belum lengkapnya fasilitas praktik, sarana bermain/olah raga, anggaran yang belum memadai, belum terciptanya kerjasama komite sekolah dengan SD yang optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Marquardt, M. J. (1996). *Building the Learning Organization a Systimatic Approach to Quantum Improvement and Global Success*. New York: McGrow-Hill.